

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek

Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Berbagai bangunan baru dibangun dengan beragam bentuk dan gaya arsitektur, tersebar di berbagai wilayah, menyatu dengan bangunan di kawasan yang sudah memiliki karakter kuat, salah satunya di Kawasan Cagar Budaya Malioboro.

Setiap kawasan perlu memiliki identitas yang menjadi karakteristiknya. Arsitektur bangunan adalah salah satu elemen untuk menunjukkan identitas tersebut. Kawasan Malioboro – khususnya dari Tugu Yogyakarta hingga titik nol kilometer Yogyakarta – dari masa berdirinya hingga masa sekarang (sebelum hingga sesudah kemerdekaan) secara kontekstual memiliki identitas sebagai jalur kawasan perdagangan. Namun, sejak tahun 2000-an, terjadi pembangunan mal, minimarket, pertokoan, dll. yang secara konsep bergaya modern. Bangunan-bangunan bersejarah pun pada perkembangannya juga ikut mengubah tampilannya menjadi modern untuk menarik perhatian pengunjung dan masyarakat. Hal ini yang kemudian menyebabkan citra dan karakter Kawasan Malioboro melemah sehingga perlahan masyarakat baik lokal maupun luar daerah lebih mengenal Kawasan Malioboro sebagai kawasan destinasi belanja ketimbang kawasan cagar budaya. Beberapa bangunan cagar budaya di kawasan tersebut juga kurang terawat dan kurang relevan secara fungsi sehingga kurang mendapat perhatian masyarakat.[1]

Perkembangan wilayah Yogyakarta selain memberi dampak pada citra kawasan, juga berdampak pada jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Yogyakarta sampai saat ini kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Meskipun menurut situs Treepedia (lembaga yang digagas World Economic Forum (WEF) dengan Senseable Lab) di

tahun 2017 Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan sebagai satu dari enam kota di Indonesia paling hijau, akan tetapi angka tersebut masih jauh dari target RTH pemerintahan Kota Yogyakarta. Dalam UU nomor 7 tahun 2016 disebutkan bahwa tiap kabupaten/kota, setidaknya memiliki luasan RTH sebesar 30 persen dari luas wilayah daerahnya. Target tersebut perlu perhatian khusus agar dapat terpenuhi, melihat luasan wilayah Kota Yogyakarta yang kecil, dipenuhi jalan-jalan sempit, penuh ruas dan tikungan, [2]

Berdasarkan isu yang ditemukan pada Kawasan Cagar Budaya Malioboro, perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai sejarah dan warisan nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang membentuk Kawasan Cagar Budaya Malioboro. Perlu adanya sebuah rancangan bangunan yang dapat menegaskan citra Kawasan Cagar Budaya Malioboro sekaligus mampu berintegrasi dengan fungsi ekonomi dan ekologi yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Metode yang digunakan yaitu metode studi kasus dan survei untuk memperoleh data dan mengetahui keadaan eksisting. Tujuan dari perancangan ini adalah menciptakan taman kota dan galeri pertunjukan seni yang dapat menegaskan citra Kawasan Malioboro sebagai kawasan cagar budaya sekaligus mewadahi ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Harapannya perancangan ini dapat menegaskan kembali eksistensi Kawasan Cagar Budaya Malioboro sekaligus mampu berintegrasi dengan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi pada kawasan tersebut.

1.1.2 Latar Belakang Permasalahan

1.1.2.1 Melemahnya Citra Malioboro sebagai Kawasan Cagar Budaya

Masa sebelum kemerdekaan hingga masa setelah kemerdekaan adalah masa di mana koridor Jalan Malioboro digunakan sebagai kawasan perdagangan, tepatnya pada tahun 1758, ketika Sri Sultan HBW I mengembangkan Koridor Jalan Malioboro daerah perdagangan. Di masa-masa awal, bangunan bergaya kolonial, pecinan dan tradisional Jawa banyak terdapat di sepanjang Koridor Jalan Malioboro. Akan tetapi, perlahan mulai tumbuh bangunan-bangunan serta elemen yang bergaya

moder. Bangunan-bangunan tersebut mengubah tampilannya untuk berlomba-lomba menarik perhatian pengunjung, akibatnya karakter kuat yang sudah ada dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya secara perlahan hilang. Secara tidak langsung, kondisi ini juga melemahkan citra Malioboro sebagai kawasan cagar budaya.

Terdapat penelitian mengenai pengaruh kegiatan komersial terhadap fungsi bangunan bersejarah di koridor Jalan Malioboro Yogyakarta yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kegiatan komersial terhadap fungsi bangunan bersejarah yang kemudian menciptakan perubahan fungsi pada bangunan bersejarah yang ada di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di atas, terdapat beberapa alasan yang ditemukan mengapa pemerintah dan masyarakat mengambil keputusan untuk mengubah bentuk, fungsi serta tampilan bangunan, antara lain : a) Terpengaruh dengan bangunan lain yang juga mengubah tampilannya menjadi modern (merasa tidak ada masalah karena yang lain juga melakukan hal demikian); b) Berusaha untuk menarik perhatian publik; c) Mengutamakan keuntungan ekonomi.

Pemerintah Kota Yogyakarta pada dasarnya menginginkan jika kawasan Malioboro ini menjadi satu kesatuan dengan sumbu filosofi DIY. PKL Malioboro menjadi salah satu fokus perhatian dari penataan tersebut. Pemkot Yogyakarta mengharapkan dan meminta kepada masyarakat agar kawasan Malioboro yang baru ini disebut sebagai "Kawasan Cagar Budaya Malioboro", bukan lagi sebagai kawasan pasca relokasi PKL Malioboro. Pemerintah juga berupaya untuk mengajukan kawasan Malioboro ini sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Selama tiga bulan, berdasarkan permintaan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Pemda DIY bersama Pemkot Yogyakarta akan mengencangkan perbaikan sarana dan bangunan di sepanjang kawasan Malioboro, salah satunya dengan menyelaraskan warna bangunan dan pertokoan dengan cat warna putih, sesuai dengan kondisi awal kawasan.

1.1.2.2 Yogyakarta Kekurangan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) didesain untuk kepentingan masyarakat, baik dalam aspek ekologis, sosial budaya, dan ekonomi. Tidak terpenuhinya jumlah RTH publik di beberapa daerah disebabkan oleh beberapa faktor, yang secara umum yaitu faktor teknis, ekonomi, kebijakan, dan politik.

Perkembangan sarana dan prasarana sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, mengubah ruang hijau menjadi faktor teknis. Kemampuan berinovasi dalam mengoptimalkan sumber daya untuk penyediaan ruang hijau juga merupakan faktor teknis yang harus dilaksanakan untuk menyeimbangkan ekosistem kawasan, mengingat banyak kawasan yang memiliki ruang terbatas namun pertumbuhannya pesat. Faktor ekonomi mengacu pada kendala keuangan dalam penyediaan ruang hijau. Masalah terbesar dalam penyediaan ruang hijau adalah biaya yang cukup tinggi saat memperoleh ruang hijau untuk digunakan. Selain dua faktor di atas, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk mengarahkan dan mengontrol kebijakan ruang hijau juga diperhitungkan. Pemerintah kota juga tidak berpartisipasi aktif dalam penyediaan ruang hijau. Permasalahan dalam penerapan penyediaan RTH secara on-site juga masih terdapat regulasi formal dan munculnya praktik pembangunan yang bersifat parsial dan tidak terintegrasi antar industri terutama dalam pengelolaannya.

Ketiga aspek di atas relevan dengan kondisi Yogyakarta saat ini, khususnya di KCB Malioboro. Penyediaan RTH kurang mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah, terutama jika pembangunan tersebut tidak mendatangkan keuntungan finansial dalam jangka pendek. Keadaan tersebut akan berdampak pada keberlanjutan lingkungan jika isu tersebut tidak mendapat respon dan solusi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dampak dari kurangnya RTH bahkan sudah mulai terlihat di masa sekarang. Menurunnya kualitas pemukiman, kualitas udara dan air

menjadi beberapa dampak yang sekarang ini sudah mulai dirasakan. Daerah resapan air yang semakin sedikit ditambah dengan pencemaran lingkungan (misalnya pembuangan limbah di sungai atau di selokan) dan curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadi banjir di ruas jalan yang biasanya tidak sampai tergenang air.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana konsep rancangan tata ruang luar dan fasad yang mengedepankan aspek kultural dan rekreatif pada taman kota di Kawasan Cagar Budaya Malioboro dengan pendekatan *sustainable architecture*.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1 Tujuan

Menciptakan taman kota yang dapat menegaskan citra kawasan Malioboro sebagai kawasan cagar budaya sekaligus mewadahi ruang terbuka hijau bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

1.3.2 Sasaran

Sasaran penyusunan konsep untuk tercapainya tujuan perancangan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji eksistensi Kawasan Malioboro sebagai kawasan cagar budaya.
- b. Menganalisis elemen penting Kawasan Cagar Budaya Malioboro.
- c. Menganalisis kegiatan pelaku di Kawasan Cagar Budaya Malioboro.
- d. Mengkaji teori *Sustainable Architecture*.
- e. Melakukan perancangan taman kota dan tempat pertunjukkan seni terbuka yang mengedepankan aspek kultural dan *sustainable* melalui pendekatan *sustainable architecture*

1.4 LINGKUP PEMBAHASAN

- a. **Lingkup Spasial**, terkait bagian yang akan diolah sebagai penekanan studi, yaitu tata ruang luar dan fasad.
- b. **Lingkup Substantial**, terkait penerapan pendekatan *Sustainable Architecture* pada fasad dan tata ruang luar.
- c. **Lingkup Temporal**, perancangan taman kota dan tempat pertunjukkan seni ini diharapkan dapat menjadi penekanan penyelesaian studi untuk waktu 25 tahun.

1.5 METODE

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer didapat melalui observasi di lapangan secara langsung untuk mengetahui mengenai lahan perancangan, kebutuhan ruang, dan permasalahan yang ada

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang dilakukan dengan studi pustaka, studi literatur terkait dengan topik yang dibahas, dan juga melalui media daring.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

ABSTRAKSI

Bab ini berisikan uraian singkat tentang keseluruhan laporan Tugas Akhir termasuk metode yang digunakan, hasil analisis, sampai kesimpulan dan saran

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pengadaan proyek dan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan-manfaat, lingkup studi, dan sistematika laporan.

BAB 2: TINJAUAN UMUM PROYEK

Bab ini berisi tinjauan Kawasan Cagar Budaya Malioboro dan tinjauan site.

BAB 3: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi teori taman kota, tempat pertunjukkan seni, tata ruang luar, fasad, dan *sustainable architecture*.

BAB 4: METODE DAN ANALISIS

Bab ini berisi metodologi dan pembahasan analisis (programatis dan penekanan desain).

BAB 5: KONSEP PERANCANGAN

Bab ini berisi konsep (dasar dan penekanan desain) perancangan dari analisis

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis mengenai permasalahan dan juga solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut serta saran yang dapat diambil.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

